

## **BAB IV**

### **FAKTOR – FAKTOR PENOLAKAN ALJAZAIR BERGABUNG DENGAN KOALISI ANTI – TERORIS (*ISLAMIC MILITARY COUNTER TERRORISM COALITION*)**

Pada Bab IV ini akan membahas tentang faktor – faktor mengapa negara Aljazair memutuskan untuk menolak bergabung dengan koalisi militer yang di gagas oleh Arab Saudi yaitu *Islamic Military Counter Terrorism Coalition* (IMCTC).

Selain negara yang bergabung, ada juga negara yang menolak untuk bergabung dengan koalisi ini padahal adanya ajakan dari Arab Saudi kepada negara muslim yang memiliki tujuan yang sama untuk melawan terorisme dan mengharapkan beberapa negara untuk bergabung, negara yang direkomendasikan untuk bergabung ini memiliki pengaruh yang baik bagi koalisi, tetapi seperti negara Indonesia, Iraq dan Aljazair memutuskan untuk menolak bergabung dengan koalisi ini. Salah satunya adalah negara Indonesia, meskipun negara indonesia memiliki agama yang bermayoritas muslim tetapi negara ini memilih untuk menolak bergabung, meskipun begitu negara ini tetap memberikan dukungan adanya suatu koalisi yang dapat berfokus untuk melawan terorisme dan anggotanya pun berasal dari negara – negara yang bermayoritas Muslim (Priyanto, 2018). Begitu pula dengan Iraq dan Aljazair memiliki kebijakan masing – masing terkait keputusan menolak bergabung dengan IMCTC.

#### **A. Aljazair Fokus terhadap Perbaikan Internal dan Keamanan Negara**

Arab Saudi dan Qatar adalah salah satu anggota dari koalisi IMCTC yang meminta negara Aljazair untuk bergabung dengan koalisinya. Tetapi Aljazair memutuskan untuk menolak

bergabung dengan koalisi anti teroris tersebut. Melihat bahwa potensi militer aljazair adalah yang terbesar di wilayah Afrika akan membantu koalisi untuk melawan terorisme khususnya di wilayah Afrika.

IMCTC memiliki visi yang seharusnya memberikan keuntungan yang besar bagi Aljazair apabila bergabung, karena ini adalah salah satu pemicu keeksistensian Aljazair di ranah internasional, agar citra bahwa negara ini adalah negara yang memiliki militer cukup kuat di wilayah Afrika dan dapat membantu menyelesaikan konflik di ranah internasional apalagi konflik ini terjadi di wilayah negara – negara Islam (Dunia Islam).

Pada dasarnya bergabung dengan IMCTC adalah salah satu keuntungan bagi negara yang bergabung dengan koalisi tersebut, yaitu (The Islamic Military Counter Terrorism Coalition, 2017) :

1. Memperkuat kontribusi negara-negara Islam terhadap keamanan dan perdamaian global, dan melengkapi upaya penanggulangan terorisme internasional.

Salah satunya yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam memperkuat hubungan mereka yaitu, Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional telah menegaskan solidaritas penuh UEA dengan Arab Saudi atas pemilihan Senat Arab Saudi pada tahun 2018 ini. Kementrian UEA juga memberikan dukungan yang tegas untuk Arab Saudi dalam upayanya menghadapi ekstremisme dan terorisme, serta menekankan pentingnya tindakan internasional untuk memproposikan perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia (Gulf News, 2018). Adanya hubungan negara yang baik akan menggerakkan dan maksimalkan visi atau operasi dalam menangani masalah yang di tuju oleh aliansi IMCTC.

2. Memperkuat solidaritas dan kolaborasi di antara negara-negara anggota koalisi untuk menghadirkan front persatuan melawan organisasi-organisasi teroris dan upaya mereka untuk mengganggu stabilitas keamanan dan mengubah citra Islam dan Muslim.

Adanya koalisi ini salah satunya akan melawan kelompok – kelompok teroris seperti *Daesh* yang berbasis di Iran, Yaman, juga di negara – negara yang memiliki konflik internal yang disebabkan oleh teroris.

3. Menentang ideologi radikal di negara-negara anggota koalisi melalui kampanye komunikasi strategis untuk membantah narasi dan propaganda radikal dan ekstremis.
4. Menegaskan kembali nilai-nilai moderat Islam dan prinsip-prinsip perdamaian, toleransi dan belas kasihnya.

Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, dalam purifikasi dan menegaskan nilai – nilai Islam yang sesungguhnya dan akan adanya ilmu pendidikan khusus dalam mengatasi terorisme.

5. Memerangi pendanaan terorisme bekerja sama dengan negara-negara anggota Koalisi dan otoritas KKP internasional, untuk mempromosikan kepatuhan terhadap perjanjian internasional dan memajukan kerangka kerja hukum, peraturan, dan operasional.
6. Membangun kemitraan strategis antara negara-negara anggota, negara-negara pendukung dan organisasi internasional untuk berbagi informasi dan keahlian anti terorisme.

Poin – poin diatas adalah salah satu visi yang sama bagi Aljazair, yaitu memiliki cita – cita dalam perdamaian. Tetapi Aljazair memutuskan untuk menolak karena memiliki

rasionalitas yang lebih menguntungkan bagi negaranya untuk mencapai kepentingan nasional dan keamanan negaranya. Dimulai dengan keadaan militer yang cukup mumpuni untuk menanggulangi di wilayah internal negara dan regional, adanya campur tangan antara pihak militer terhadap politik Aljazair, juga adanya masalah internal seperti ketegangan etnis yang menjadi salah satu pemicu konflik saudara, serta adanya ketidakpuasan pelayanan negara bagi masyarakat.

### **1. Kekuatan Militer Aljazair**

Dalam melawan terorisme di dalam negara Aljazair sendiri memiliki pengalaman dalam taktik kontra-terorisme karena mereka telah memerangi ancaman jihadis sejak awal 1990-an. Pada tahun 2011, militer Aljazair menggunakan dua cabang atau strategi dalam melawan teroris yaitu menyerang tempat persembunyian di timur laut negaranya dengan pemboman udara dan operasi dipermukaan, kemudian negara ini berusaha untuk memotong koneksi para teroris dari sebagian kelompok mereka yang berada di selatan yang menjadi sumber atas dana dan materialnya. Operasi ini berhasil telah menelan korban 250 orang anggota AQIM selama tahun 2007 sampai 2010 data ini di kutip dari (Gaub, Algeria's army: on jihadist alert , 2015, hal. 3).

Pada tahun 2018 Aljazair ada di urutan ke 23 dari 136 negara dalam *Global Firepower review* melihat dari *Power Index* nya 0.4296. Sudah diberitahukan pada bab sebelumnya bahwa, skor yang lebih rendah adalah yang terbaik di indeks GFP (GFP - World Military Strength, 2018). Pemerintah Aljazair meningkatkan anggaran pertahanannya mencapai \$10 miliar pada tahun 2017, mewakili 6,24 persen dari PDB dan meningkat 176 persen sejak 2004. Pada tahun 2017, menurut SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*) importir senjata utama di benua Afrika dengan 46 persen dari semua impor ke wilayah tersebut (Ghanem-Yazbeck, *The Algerian Army : Cooperation, Not Intervention*, 2017).

No.	Nama jenis kekuatan	Total kekuatan
1	Total personel militer	792,350 orang
2	Total <i>Aircraft Strength</i>	528
3	Total <i>Helicopter Strength</i>	280
4	<i>Combat Tanks</i>	2,405
5	<i>Armored Fighting Vehicles</i>	6.754

Table 4. 1 Indeks Kekuatan Militer Aljazair  
(GFP - World Military Strength, 2018)

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa negara Aljazair adalah salah satu negara yang memiliki pasukan keamanan yang memiliki kinerja terbaik di benua Afrika. Negara ini berpengalaman dalam operasi kontra – terorisme dan kontra – pemberontakan juga telah berjuang dalam menghadapi jaringan jihad selama dekade terakhir.

Kemudian dengan Aljazair memiliki kekuatan militer yang cukup kuat di Afrika, memiliki kepercayaan bagi negara regional lainnya untuk bekerjasama dengan negara ini. Aljazair dan Tunisia kini memiliki hubungan bilateral, Komisi Gabungan Tinggi Aljazair – Tunisia ke 21 menyatakan dalam sebuah pers bahwa kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat baik disemua bidang, terutama di bidang ekonomi dan keamanan (Middle East Observer, 2017).

## 2. Peran Militer dalam Politik

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Carnegie Middle East Center (Ghanem, 2018), bahwa militer adalah pemegang utama kekuatan nasional. Kemudian peran tentara di negara ini adalah berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan Aljazair atau disebut dengan para *Décideurs* dalam bahasa Prancis yaitu sebagian terdiri dari anggota senior Tentara Nasional Rakyat (PNA), partai – partai politik memiliki hubungan dekat dengan militer, seperti Front

Pembebasan Nasional (FLN) dan Reli Nasional untuk Demokrasi (RND) serta elit politik dan ekonomi berpengaruh lainnya.

Kemudian ada juga pendapat dari (Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI) , 2016, hal. 10) bahwa tentara hanya mempengaruhi pengambilan keputusan. Berarti bahwa presiden harus mendapatkan dukungan dari para pemimpin dan perwakilan tentara. Sistem demokrasi memang ada tetapi terbatas, karena para pembuat keputusan telah memberikan warga kebebasan terbatas.

### 3. Adanya Ketegangan Etnis

Bentrokan etnis terjadi antara Berber Mozabite (Bani Mzab) dan Arab Chaamba di provinsi Ghardaia, 600 km selatan Aljir. Bentrokan ini terjadi dimulai pada dua tahun yang lalu yaitu pada tahun 2013, menewaskan lebih dari 20 orang dan melukai 300 orang. Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika memberikan perintah atau keputusan untuk mengirim pasukan militer ke Ghardaia. Ghardaia sudah menjadi rumah bagi dua komunitas etnis yang berbagi sejarah panjang persaingan atas kepemilikan tanah, properti dan perumahan. *Mozabber Berber* adalah *Ibadis*, mengikuti bentuk Islam yang berbeda dari Sunni dan Syiah, sementara *Chaamba Arab*, awalnya *Bedouins*, mempraktikkan pendekatan Maliki ke Islam (Benlakehal, 2015).

Konflik ini terjadi sudah sejak lama yaitu pada tahun 1975, penyebab konflik ini lebih ke politik, sosial dan ekonomi. Adanya pengangguran di wilayah ini dan mayoritas kaum muda tidak memiliki prospek pekerjaan di masa depan. Bentrokan juga terkait dengan tanah dan perumahan. Menurut laporan dari (Ghanem-Yazbeck, *Roots of Arab-Berber Violence Go Unaddressed in Algeria*, 2015) pada tahun 2013, kerusuhan terjadi ketika adanya alokasi perumahan yang disubsidi negara, di mana kedua kubu merasa yang lain diberi perlakuan istimewa. Pada dasarnya, kedua komunitas tidak saling percaya,

dan masing-masing merasa dipinggirkan oleh yang lain. Orang Berber menuduh orang Arab mendapat manfaat dari perlakuan istimewa oleh pemerintah, termasuk memperoleh pekerjaan dan tempat tinggal yang lebih baik, karena mereka orang Arab. Sementara itu, orang-orang Arab menuduh Berber, yang umumnya dianggap lebih kaya, menghalangi integrasi orang Arab yang lebih miskin ke dalam struktur sosial eksklusif mereka.

#### **4. Ketidakpuasan Masyarakat Aljazair**

Aljazair memiliki peran aktif dalam membantu menyelesaikan konflik di negara – negara tetangga, karena melihat dari kemampuan Aljazair yang dapat menjadi penengah konflik antara negara di regional, seperti peran aktif Aljazair di Mali dan Libya. Adanya peran Aljazair di ranah regional dan internasional menyebabkan kerentanan prospek ekonomi dan keamanan domestiknya, karena adanya campur tangan Aljazair di negara luar yang memiliki konflik saudara seperti di Mali menjadikan kelompok pemberontak membalas dengan menyerang negara Aljazair yang ikut campur akan konflik yang ada.

Kemudian adanya pengiriman militer atau kekuatan militer dan pengaruh politiknya untuk mendorong stabilitas regional dan mengoordinasikan upaya regional untuk memerangi kelompok-kelompok teroris. Hal tersebut dapat menyebabkan protes dari masyarakat di Aljazair Utara karena kurangnya pemberian layanan publik dan marginalisasi daerah pedesaan (Carboni, 2015).

Adanya penurunan harga minyak internasional pada tahun 2014 dan 2015 menimbulkan kekhawatiran bagi stabilitas jangka menengah ekonomi Aljazair. Kemudian adanya degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan telah menyebabkan protes di seluruh negeri. Begitu pula dalam lingkup politik, Aljazair mengalami kerusakan dan pemogokan

yang menyebar pula di internal negara Aljazair ((BTI) B. S., 2016, hal. 2)

### **5. Keputusan Aljazair Menolak bergabung dengan IMCTC**

Telah dijelaskan bahwa kekuatan dan peran militer Aljazair sangat berpengaruh dalam perkembangan negaranya, baik di ranah internal maupun eksternal. Adanya militer Aljazair seharusnya akan memperkuat negara dari konflik yang disebabkan oleh kelompok – kelompok teroris.

Aljazair tidak akan mengirim pasukan ke luar negeri karena khawatir mereka berubah menjadi pasukan tambahan dari kekuatan besar, kemudian melihat dari perbedaan mencolok antara DRS (*Département du Renseignement et de la Sécurité*) dan komando tinggi tentara dalam sikap mereka terhadap rekan-rekan asing. Tentara Aljazair selalu enggan terlibat dalam segala bentuk latihan militer bersama yang mungkin menyarankan ide. Ketika Perwira Aljazair dilatih di luar negeri untuk menangani senjata yang dibeli di A.S, Jerman dan Italia, sulit untuk membayangkan bahwa para pemimpin senior militer Aljazair akan dapat menolak untuk bertukar gagasan dengan rekan-rekan mereka yang jauh lebih lama (Middle East Institute, 2017).

Berbeda sekali dengan komando tinggi militer, DRS, seperti pendahulu SM (*The Securite Militaire*), telah bekerja dengan rekan-rekan asing selama beberapa dekade. Budaya pertukaran dan kerja sama ini mulai dari membantu menyelesaikan krisis pembajakan pada tahun 1970-an dan 1980-an, hingga membantu AS dalam perang melawan al Qaeda di Afghanistan.

Adapun salah satu alasan tidak dilibatkannya tentara Aljazair diluar regionalnya bahwa negara Aljazair sudah berkomitmen dan melindungi tentara militernya dari peristiwa konflik di luar negeri dan luar regionalnya. Ini adalah salah satu



keuntungan bagi Aljazair karena ketika tentara yang telah dilatih dengan profesional kemudian tentara ini dikerahkan untuk berfokus di dalam negaranya, maka biaya atau dana peralatan militer tidak akan membludak dan menjadikan negara Aljazair harus membeli peralatan tentara militernya ke negara lain seperti, Amerika Serikat, Prancis dan Jerman.

Peran militer bagi politik Aljazair entah itu memang adalah salah satu jalan untuk mencapai kestabilan dan perdamaian bagi masyarakat agar terhindar dari masalah yang berkaitan dengan kelompok teroris atau hanya akan membatasi kebebasan atau demokrasi dari masyarakat Aljazair, yang terpenting usaha yang dilakukan agar dapat memberikan perdamaian dan keamanan bagi masyarakat nasionalnya.

Menurut (Stratfor : WORLDVIEW, 2015) empat masa jabatan presiden Bouteflika telah membentuk Aljazair menjadi negara yang stabil yang diperintah oleh kepemimpinan sipil yang kuat. Pemimpin Aljazair berikutnya akan menjadi figur yang lebih netral yang akan memenuhi persyaratan elit politik, ekonomi dan militer negara itu. Bouteflika akan memastikan keunggulan pasukan keamanan dalam memerangi kelompok-kelompok militan, melindungi pendapatan hidrokarbon negara itu dan mempertahankan jaringan patronase Aljazair yang luas ((BTI) B. S., 2016)

Presiden Bouteflika sudah empat periode dalam masa jabatannya semenjak tahun 1999 sampai sekarang 2018. Salah satu program yang difokuskan terhadap negara Aljazair adalah adanya pemulihan perdamaian dan keamanan untuk pembangunan yang berkelanjutan di negara tersebut. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga adalah satu program yang difokuskan, melihat dari sejarah yang kelam karena telah terjadi perang saudara di negara ini. Maka ini adalah visi utama yang harus diperhatikan (Tlemçani, 2018).

Hal tersebut adalah salah satu fokus utama Aljazair dalam menangani teroris, salah satu keuntungan bagi Aljazair

apabila menolak bergabung selain karena merasa negara ini masih mampu melawan teroris dengan kekuatan militer yang dimiliki yang memang tidak terlepas dari bantuan Amerika Serikat. Akan lebih menguntungkan apabila mengedepankan atau memfokuskan perbaikan negaranya daripada ikut bergabung dengan IMCTC, yang memang pada dasarnya memiliki visi yang sama untuk melawan terorisme.

### **B. Aljazair adalah Negara non – Blok yang berupaya menghindari Konflik Intervensi Negara Luar**

Upaya dalam memerangi terorisme salah satunya menggunakan kekuatan tentara militer, baik itu di dalam negara ataupun diluar negaranya, sebagai upaya membantu melawan terorisme di wilayah lain, bisa di ranah regional ataupun di ranah non regional. Seperti yang dilakukan Aljazair sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh bagi perdamaian di wilayah Afrika. Dalam sejarahnya, pasukan keamanan Aljazair berhasil menghancurkan pemberontakan selama satu dekade dan dalam meningkatnya kestabilan regional, Amerika dan Eropa menganggap Aljazair sebagai mitra keamanan yang berpotensi di wilayah Maghreb dan Sahel (Francis Ghilès, Updating Algeria's Military Doctrine, 2017).

Pada tahun 1970 – 1980 an adalah tahun yang menjadikan Aljazair memiliki peran di ranah internasional, salah satunya pada tahun 1974 Aljazair membantu mengusir rezim *Apartheid* di Afrika Selatan dari Majelis Umum PBB (UNGA). Abdelaziz Bouteflika sebagai Menteri Luar Negeri Aljazair menjadi Majelis Umum, pada saat itu untuk mendukung adanya gerakan anti – *Apartheid* Bouteflika berpendapat bahwa delegasi yang dikeluarkan oleh Afrika Selatan tidak sah karena mereka hanya mewakili dari kulit putih (The New York Times, 1981). Kontribusi ini dikenal sebagai “keputusan Bouteflika” (Embassy of People's Democratic Republic of Algeria in Pretoria, t.thn.). *Apartheid* adalah pembuatan Undang – Undang yang memaksa berbagai kelompok ras untuk hidup dan berkembang secara terpisah,

*Apartheid* adalah sistem sosial yang sangat merugikan sebagian besar penduduk, hanya karena perbedaan warna kulit, banyak penguasa yang berkulit putih sedangkan sebaliknya ketika tidak memiliki warna kulit putih banyak yang hidup miskin (About South African History Online (SAHO), 2018).

Adanya koalisi IMCTC, mengeluarkan kebijakan untuk ikut berkontribusi dalam melawan terorisme di negara anggota khususnya dan umumnya di negara Muslim atau yang bermayoritas Muslim. Adanya campur tangan pihak dari anggota IMCTC ini yang membuat negara Aljazair menolak bergabung. Adapun melihat dari Kebijakan Luar Negeri yang dimiliki oleh negara Aljazair.

Semenjak kemerdekaan Aljazair pada tahun 1962, negara ini telah mengadopsi Kebijakan Luar Negeri berdasarkan prinsip yang diterapkan oleh revolusi Aljazair. Prinsip – prinsip ini adalah yang pertama mendukung hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri tanpa adanya campur tangan dalam urusan internal negara dan penyelesaian konflik secara damai. Prinsip – prinsip ini dirumuskan dalam kerangka program Tripoli pada Juni 1962 yang diusulkan setelah kemerdekaan oleh Dewan Revolusi Nasional, yang mengabdikan komitmen negara Aljazair terhadap kebijakan luar negeri untuk perjuangan melawan imperialisme dan dukungan gerakan pembebasan di dunia. Berkenaan dengan prinsip hak rakyat atas penentuan nasib sendiri, revolusi Aljazair berkontribusi pada pengadopsian resolusi PBB 1514 tentang hak rakyat atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan pada 14 Desember 1960.

Adanya konstitusi 1976 yang berisi bahwa tidak ada intervensi militer di luar perbatasan negara Aljazair, Pasal 90 dari konstitusi 1976 menyatakan "Sesuai dengan prinsip dan tujuan Gerakan Non-Blok, Aljazair akan berjuang untuk perdamaian, hidup berdampingan secara damai, dan tidak

campur tangan dalam urusan internal negara." (Democratic Arabic Center , 2017).

Salah satu contohnya dalam penentuan nasib sendiri dan melindungi tentara militernya sebagai pasukan keamanan negaranya, Aljazair memilih agar tentara tidak campur tangan di luar negeri, namun harus melindungi perbatasannya sementara dikelilingi oleh negara-negara lemah yang tidak dapat memiliki kendali atas wilayah mereka, apalagi perbatasan mereka.

Aljazair selalu berusaha untuk tetap netral dalam konflik regional dan jika mungkin, berfungsi sebagai perantara. Ini menjelaskan penolakan Aljazair, misalnya untuk memutuskan hubungan dengan Pyongyang setelah uji coba nuklir Korea Utara pada September 2016, meskipun ada tekanan kuat untuk melakukannya dari Amerika Serikat dan Korea Selatan (Francis Ghilès, Updating Algeria's Military Doctrine, 2017).

Adapun intervensi militer yang pernah dilakukan oleh Aljazair adalah tentara Aljazair membantu melindungi Sahara Barat yang melarikan diri dari memajukan pasukan Maroko di Sahara Barat pada musim dingin 1975-1976 (Democratic Arabic Center , 2017). Tetapi, untuk mengimbangi batas – batas non – intervensi, Aljazair memiliki alternatif lain, negara ini telah memperkuat kerjasama dengan negara tetangga atau negara yang berasal di wilayah regionalnya seperti Mali, Libya, Nigeria dan terutama Tunisia.

Komisi Gabungan Tinggi Aljazair – Tunisia ke 21 menyatakan dalam sebuah pers bahwa kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat baik disemua bidang, terutama di bidang ekonomi dan keamanan. Adanya rekonsiliasi atau perbuatan memulihkan hubungan persahabatan telah ditawarkan oleh pihak Algeria. Kemudian, adanya penandatanganan untuk pengembangan dan visi geostrategis

bersama, adalah memberikan atau menstabilkan koordinasi dan pertukaran pengalaman serta keahlian dikawasan yang mencangkup aspek ekonomi dan keamanan (Middle East Observer, 2017).

Aljazair membantu pasukan keamanan Tunisia yang tidak terampil dan tidak siap dengan pelatihan taktik kontra-terorisme, strategi pengajaran Unit Intervensi Cepat *Gendarmerie Elite* serta pengajaran laboratorium kriminologi dan forensik. Kedua negara telah bertukar beberapa delegasi tingkat tinggi. Tunisia misalnya, mengirim beberapa delegasi dari Angkatan Darat, cabang intelijen dan Angkatan Udara ke Aljir. Pada 2012, kedua negara menandatangani perjanjian keamanan perbatasan yang memfasilitasi patroli dan operasi bersama untuk memerangi Al Qaeda di kelompok-kelompok terkait Maghreb Islam di Jebel Chaambi serta kelompok-kelompok kriminal dan penyelundupan.

Pada 2013 Algiers dan Tunisia membentuk Unit Intelijen Gabungan. Kerja sama ini telah menghasilkan beberapa operasi yang sukses di antaranya, penargetan baru-baru ini dari pemimpin batalion Uqba Bin Nafi, Khaled Hamadi al-Shayeb, Aka Abu Sakhr bersama dengan dua militan bersenjata lainnya. Abu Sakhr diyakini sebagai dalang di balik beberapa serangan misalnya, serangan Menteri dalam Negeri Tunisia, Lotfi Ben Jeddou pada Mei 2014, pemenggalan kepala Polisi Tunisia pada bulan Desember tahun yang sama dan serangan museum Bardo pada bulan Maret 2015 (Ghanem-Yazbeck, *The Algerian Army : Cooperation, Not Intervention*, 2017) .

Faktor lain yang membuat Aljazair memutuskan untuk tidak bergabung dengan IMCTC adalah menghindari adanya upaya intervensi negara Aljazair ke negara lain diluar regionalnya ini akan memberikan pengaruh terhadap pengeluaran militer ataupun adanya penugasan tentara militer di luar regionalnya, karena negara Aljazair tidak ingin tentara militernya ikut turun dalam menyelesaikan atau melawan

teroris diluar wilayahnya. Selain itu, keuntungan yang mungkin didapat adalah meminimalisasi adanya intervensi ke negara Aljazair dengan alasan adanya konflik internal atau perang saudara yang tidak dapat diselesaikan oleh Aljazair.

Secara garis besar dapat dilihat dari tabel 4.4 dibawah, bahwa keuntungan yang lebih dominan bagi negara Aljazair adalah tidak bergabung dengan koalisi militer IMCTC, karena memiliki alternatif – alternatif yang lebih rasional dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan nasional yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

No.	Bergabung	Tidak Bergabung
1	<p>Dengan bergabung akan lebih mudah dalam melawan terorisme khususnya di wilayah Timur Tengah, umumnya di negara – negara yang bermayoritas Muslim. Tetapi, asumsi yang timbul apabila turut bergabung akan menjadi bumerang bagi negara anggota, dengan melakukan penyerangan terhadap negara yang memiliki konflik akan ada sikap benci dan menimbulkan balas dendam atau penyerangan kembali dari teroris tersebut (Tasnim News Agency, 2019).</p>	<p>Dapat berfokus pada penyelesaian konflik internal atau terorisme dengan cara yang dilakukan sesuai keinginan dan strategi negara Aljazair.</p>

2	Membangun kerjasama yang strategis antar negara anggota, tidak hanya di lingkup operasi militer tetapi juga dalam berbagi informasi serta keahlian anti terorisme.	Memiliki kekuatan militer yang baik, menjadikan anggaran militernya untuk memenuhi kebutuhan negaranya.
3	-	Aljazair adalah negara anggota non – blok, maka negara ini berupaya untuk menghindari konflik akibat intervensi negara luar.

Table 4. 2 komparasi keuntungan rasional yang lebih dominan bagi Aljazair

Tetapi, bukan berarti Aljazair tidak mendukung adanya suatu koalisi yang berfokus untuk melawan teroris. Aljazair akan mendukung, sejauh ini dengan cara memberikan bantuan logistik bagi negara yang terkena konflik yang disebabkan oleh perang saudara atau teroris seperti di Libya, Yaman ataupun negara di Timur Tengah lainnya.